



## GAMBARAN PELAYANAN BAPPEDA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR



Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan suatu lembaga pemerintahan yang bertugas membantu Kepala Daerah dalam menyelenggarakan dan melaksanakan kebijakan pemerintahan terutama berta

ggungjawab atas perencanaan pembangunan daerah. Penjabaran tersebut merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dimana Kepala BAPPEDA bertanggungjawab terhadap tugas pokok dan fungsi perencanaan pembangunan.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, BAPPEDA selalu berupaya untuk meningkatkan kinerjanya sebagai lembaga perencanaan yang handal dalam semua aspek pembangunan termasuk penerapan *good governance* secara konsisten. Selain itu, sebagai upaya pencapaian visi dan misi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur lima tahun ke depan, BAPPEDA memprioritaskan pada peningkatan kapasitas, kecepatan dan mutu pelayanan, serta efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumber daya yang dimiliki.

Anggaran berbasis kinerja akan menjadi dasar penganggaran setiap kegiatan sehingga sasaran dan indikator pencapaian hasil dari program pembangunan dapat terealisasi sesuai target. Pencapaian kinerja pemerintah untuk mencapai target sasaran pembangunan daerah harus memiliki ukuran yang jelas agar dapat dipergunakan sebagai alat pengendali dan evaluasi setiap tahapannya agar mengetahui efektivitas dari perencanaan pada awal periode.

Sistem pengendalian dan evaluasi akan terus dioptimalkan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, serta kajian strategik pembangunan daerah, baik yang terkait dengan metodologi dan pelaksanaannya maupun penggunaan dan tindak lanjut hasilnya. Selain itu, peningkatan kemampuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi seluruh aparatur BAPPEDA akan terus dipacu untuk meningkatkan produk perencanaan yang dinamis, efektif, dan efisien. Terkait dengan hal tersebut, tantangan berupa perubahan lingkungan strategis internal dan eksternal harus mampu diatasi oleh setiap bidang di

lingkungan BAPPEDA dalam menyusun perencanaan dan merumuskan kebijakan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing bidang.

Terorganisirnya basis data dan informasi pembangunan merupakan salah satu prioritas program BAPPEDA Provinsi Kalimantan Timur ke depan, sehingga masyarakat, *stakeholders*, maupun lembaga pemerintah lain akan lebih mudah untuk mengakses, mencari, serta menggunakan data dan informasi sebagai input dalam proses perencanaan pembangunan. BAPPEDA secara kontinyu akan melakukan upaya untuk menjamin produk perencanaan dan hasil kajian strategik pembangunan tidak saja berdaya guna dan berdaya hasil bagi penentu kebijakan, tetapi juga dapat dimanfaatkan oleh *stakeholders* dan masyarakat umum.

Reformasi Birokrasi dalam perencanaan pembangunan daerah ditujukan sebagai upaya peningkatan kualitas perencanaan dari sisi kualitas aparatur pemerintahan. Salah satu program pencapaian reformasi perencanaan adalah terbentuknya Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPPD) sejak Tahun 2010 yang dipergunakan sebagai proses penyusunan usulan APBD secara online kepada seluruh SKPD dan Kabupaten/Kota. Selain itu, pengintegrasian SIPPD dengan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIMDA), Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi Pembangunan (SIMONEV), serta Sistem Monitoring Data Spasial (SIMODAS) segera diupayakan.

Penerapan SIMONEV yang berbasis teknologi informasi dalam rangka mempermudah dan mempercepat proses pelaporan pelaksanaan dan pengendalian kegiatan pembangunan daerah, sangat diharapkan peranannya dalam memantapkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai tujuan pembangunan.

Pelaksanaan Otonomi Daerah sangat mempengaruhi kemajuan pembangunan dan penataan ruang kabupaten/kota di daerah. Dinamisasi pembangunan daerah cukup menuntut adanya transparansi informasi oleh publik terhadap program-program pembangunan yang telah dilaksanakan, sedang dibangun, maupun yang akan dikembangkan. Oleh karena itu, berdasarkan amanat Peraturan Pemerintah No. 85 Tahun 2007, penting adanya realisasi pembangunan Sistem Monitoring Data Spasial (SIMODAS) ke dalam bentuk sistem informasi berbasis web GIS (*Geographic Information System*), untuk mengembangkan geo-database dan menyempurnakan informasi penataan ruang daerah.

Badan Perencanaan Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur yang telah mendapatkan SERTIFIKAT ISO 9001: 2008 masih perlu penyempurnaan dalam menyusun perencanaan pembangunan maupun dalam menjalankan fungsi monitoring dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah. Namun terdapat hal positif lainnya yakni Tim Evaluasi Pengawasan Penyerapan Anggaran (TEPPA) yang telah dibentuk sebagai upaya dalam pengendalian dan percepatan penyerapan anggaran APBD Provinsi Kalimantan Timur berhasil menunjukkan peningkatan kualitas perencanaan pembangunan di Kalimantan Timur.

## **2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi BAPPEDA**

### **2.1.1. Tugas Pokok BAPPEDA Provinsi Kalimantan Timur**

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 46 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Inspektorat; Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kalimantan Timur, bahwa BAPPEDA Provinsi Kalimantan Timur selaku unsur perencanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah mempunyai tugas pokok yaitu melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan dan statistik daerah.

Menurut Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 09 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah, pada bagian kedua dalam peraturan daerah tersebut menyatakan bahwa:

- a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur perencanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
- b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dipimpin oleh **seorang Kepala Badan** yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

### **2.1.2. Fungsi BAPPEDA Provinsi Kalimantan Timur**

Sebagai instansi yang memiliki peran vital dalam pembangunan daerah, BAPPEDA Provinsi Kalimantan timur harus menjalankan fungsinya secara efektif dan efisien sesuai

dengan amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku. Fungsi BAPPEDA dalam menyelenggarakan tugas pokoknya adalah sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan bidang perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan RPJMD yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
- b. Pemberian dukungan atas perencanaan, pembinaan, dan pengendalian kebijakan bidang perencanaan pembangunan daerah;
- c. Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi, dan pengendalian bidang ekonomi;
- d. Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi, dan pengendalian bidang pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM);
- e. Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi, dan pengendalian bidang pemerintahan dan aparatur;
- f. Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi, dan pengendalian bidang prasarana dan pengembangan wilayah;
- g. Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi, dan pengendalian bidang statistik dan pembangunan;
- h. Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi, dan pengendalian bidang pengkajian dan pembiayaan pembangunan daerah;
- i. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
- j. Penyelenggaraan unit pelaksana teknis badan;
- k. Pembinaan kelompok jabatan fungsional; dan
- l. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi BAPPEDA seperti yang dijabarkan di atas, maka Kepala BAPPEDA memiliki tugas pokok, fungsi, dan rincian tugas sebagai berikut:

- a. Mengoordinasikan penyusunan rencana program badan dengan mengarahkan dan memberi petunjuk untuk menyusun rencana kerja;
- b. Menyusun rencana strategis badan berdasarkan rencana strategis pemerintah provinsi melalui usulan program, permasalahan, dan skala prioritas untuk kejelasan arah penyusunan rencana kerja;
- c. Mengoordinasikan dan menetapkan rencana kerja badan dengan mengarahkan dan memberi petunjuk untuk ketepatan pencapaian sasaran program;

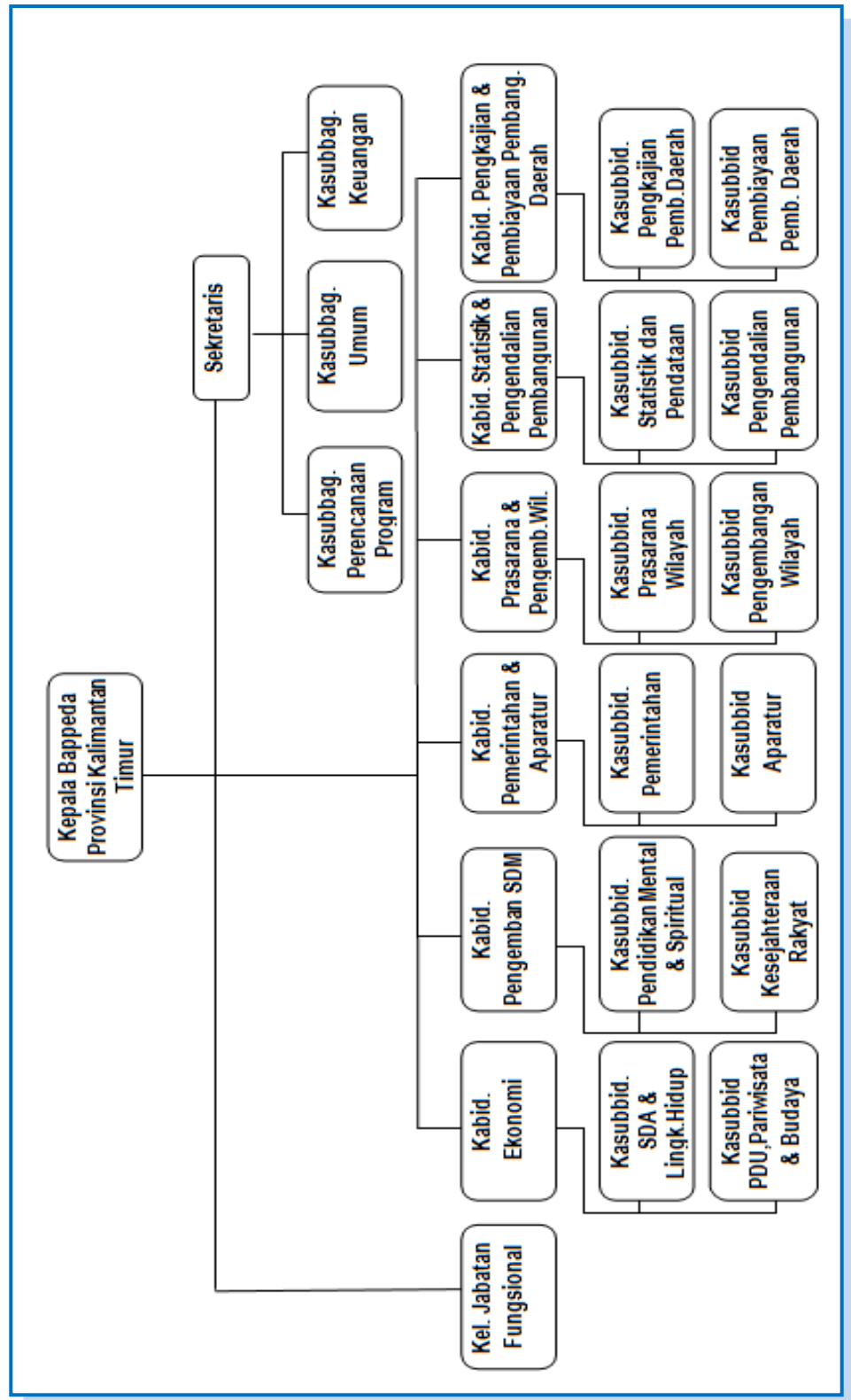
- d. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas badan berdasarkan program untuk sinkronisasi tugas;
- e. Mendistribusikan tugas kepada sekretariat dan bidang-bidang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya agar kegiatan berjalan sesuai dengan program kerja masing-masing;
- f. Menandatangani naskah dinas sesuai dengan kewenangannya untuk tertib administrasi;
- g. Menyelenggarakan musyawarah rencana pembangunan sesuai peraturan yang berlaku untuk menjamin tercapainya koordinasi dan kesepakatan perencanaan pembangunan daerah;
- h. Menyusun rancangan awal dan rancangan akhir rencana pembangunan daerah sesuai peraturan yang berlaku sebagai acuan pelaksanaan pembangunan di daerah;
- i. Melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan sinergitas perencanaan pembangunan dengan instansi terkait, kabupaten/kota, instansi vertikal, serta pihak ketiga berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk keberhasilan pelaksanaan kegiatan;
- j. Menghimpun dan menganalisa hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan;
- k. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk mengetahui tingkat pencapaian program;
- l. Menyusun evaluasi rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi dari SKPD sebagai bahan penyusunan rencana pembangunan daerah untuk periode berikutnya;
- m. Melakukan pembinaan kelompok jabatan fungsional sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk optimalisasi tugas;
- n. Melakukan pengawasan dan penilaian kepada pegawai dengan cara memberikan pengarahan dan pembinaan sesuai dengan peraturan/pedoman dalam rangka meningkatkan kinerja pegawai;
- o. Mengevaluasi pelaksanaan program sekretariat dan bidang berdasarkan realisasi tingkat pencapaian pelaksanaan kegiatan dalam rangka akuntabilitas kinerja instansi pemerintah; dan
- p. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan melaporkan kepada pimpinan.

### 2.1.3. Struktur BAPPEDA Provinsi Kalimantan Timur

Berdasarkan Peraturan Daerah No. 09 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah, serta Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur No. 46 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kalimantan Timur, bahwa Organisasi BAPPEDA Provinsi Kalimantan Timur dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya mempunyai komposisi struktur organisasi sebagai berikut:

1. Kepala
2. Sekretariat:
  - a. Sub Bagian Perencanaan Program
  - b. Sub Bagian Umum
  - c. Sub Bagian Keuangan
3. Bidang Ekonomi:
  - a. Sub Bidang SDA dan Lingkungan Hidup
  - b. Sub Bidang Pengembangan Dunia Usaha, Pariwisata, dan Budaya
4. Bidang Pengembangan SDM:
  - a. Sub Bidang Pendidikan, Mental, dan Spritual
  - b. Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat
5. Bidang Pemerintahan dan Aparatur:
  - a. Sub Bidang Pemerintahan
  - b. Sub Bidang Aparatur
6. Bidang Prasarana dan Pengembangan Wilayah:
  - a. Sub Bidang Prasarana Wilayah
  - b. Sub Bidang Pengembangan Wilayah
7. Bidang Statistik dan Pengendalian Pembangunan:
  - a. Sub Bidang Statistik dan Pendataan
  - b. Sub Bidang Pengendalian Pembangunan
8. Bidang Pengkajian dan Pembiayaan Pembangunan Daerah:
  - a. Sub Bidang Pengkajian Pembangunan Daerah
  - b. Sub Bidang Pembiayaan Pembangunan Daerah
9. Kelompok Jabatan Fungsional

Gambar 2.1.  
Struktur Organisasi BAPPEDA Provinsi Kalimantan Timur



## 2.2. Sumber Daya BAPPEDA Provinsi Kalimantan Timur

### 2.2.1. Sumber Daya Manusia BAPPEDA Provinsi Kalimantan Timur

Dalam rangka menjalankan kegiatan organisasi, BAPPEDA Provinsi Kalimantan Timur mempunyai personil **sebanyak 159 keseluruhan yang terdiri dari 115 jumlah PNS, jumlah tenaga honorer 1 orang dan jumlah tenaga outsourcing 43 orang.**

Komposisi jabatan dalam struktur organisasi BAPPEDA Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan peraturan daerah adalah: 1 (satu) orang Eselon II; 7 (tujuh) orang Eselon III terdiri dari 1 (satu) orang sekretaris dan 6 (enam) orang kepala bidang, serta 15 orang Eselon IV yang dan non eselon 92.

**Tabel 2.1**  
**Rekapitulasi Pegawai BAPPEDA Provinsi Kalimantan Timur**  
**Berdasarkan Eselon & Jenis Kelamin Tahun 2013**

No	ESELON	JENIS KELAMIN		
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	I	0	0	0
2	II	1	0	1
3	III	6	1	7
4	IV	10	5	15
<b>JUMLAH TOTAL</b>		<b>17</b>	<b>6</b>	<b>23</b>

Sumber: Data Kepegawaian BAPPEDA Provinsi Kalimantan Timur, tahun 2013

Sumber daya manusia merupakan komponen penting dalam menjalankan kinerja organisasi secara keseluruhan karena manusia merupakan subyek dalam pelaksanaan kegiatan. Sebaik apapun suatu sistem tidak akan berjalan dengan baik jika tidak didukung oleh sumber daya manusia yang profesional sesuai bidangnya masing-masing. Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia perlu dirancang sesuai dengan kebutuhan organisasi terutama dalam menciptakan BAPPEDA sebagai *center of knowledge* dan *learning organization*. Besarnya komposisi jumlah pegawai BAPPEDA dengan latar belakang pendidikan sarjana jika dibandingkan dengan non sarjana, diharapkan memberikan andil yang cukup besar dalam pengembangan kualitas BAPPEDA.



### 2.2.2. Sarana dan Prasarana

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi BAPPEDA Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013–2018 dengan cara melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara efektif dan efisien, maka BAPPEDA Provinsi Kalimantan Timur di dukung oleh sarana dan prasarana sebagai berikut:

**Tabel 2.2.**  
**Rekapitulasi Sarana dan Prasarana BAPPEDA Provinsi Kalimantan Timur**

NO	URAIAN	Luas/Unit
(1)	(2)	(3)
1	Tanah	8.700 m <sup>2</sup>
2	Bangunan Gedung Musholla	110 m <sup>2</sup>
3	Bangunan Gedung terdiri dari:	6.525 m <sup>2</sup>
	a. Ruang Kerja	11 unit
	b. Ruang Rapat	5 unit
	c. Ruang Saji	1 unit
	d. Kantin	1 unit
4	Alat Angkutan:	
	a. Kendaraan Roda 4	42 unit
	b. Kendaraan Roda 2	56 unit
5	Alat Studio dan Alat Komunikasi	194 unit
6	Peralatan Komputer	489 unit
7	Komputer PC	35 unit
8	Laptop/Note Book	102 unit

Sumber: Data Inventaris Barang BAPPEDA Prov.Kaltim 2013

Sarana dan prasarana pendukung kegiatan BAPPEDA Provinsi Kalimantan Timur adalah tanah seluas 8.700 m<sup>2</sup>, bangunan gedung kantor seluas 6.525 m<sup>2</sup>, bangunan gedung musholla seluas 110 m<sup>2</sup>, kendaraan dinas roda 4 sebanyak 42 unit , kendaraan dinas roda 2 sebanyak 56 unit, peralatan komputer sebanyak 489 unit, *notebook* 102 unit, komputer PC sebanyak 35 unit, serta ruang rapat yang memadai dapat menampung 30 hingga 200 orang (ruang rapat POLDAS, PROPEDA, PUSIDO, REPETADA, dan 1 ruang rapat biasa).

Dalam hal peningkatan perencanaan pembangunan daerah, data dan informasi menjadi hal yang vital bagi proses penyusunan produk-produk perencanaan, pengendalian, evaluasi,

serta kajian pembangunan di BAPPEDA. Berbagai sumber data dan informasi telah digunakan sebagai bahan dalam penyusunan rencana dan evaluasi pembangunan daerah, diantaranya:

- a. Unit kerja pada tingkat pemerintah pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota;
- b. Lembaga pendidikan/ perguruan tinggi; dan
- c. Masyarakat (yang dilakukan melalui dialog publik).

Sumber data yang valid merupakan pondasi utama dalam penyusunan dokumen perencanaan karena analisis kondisi daerah akan menentukan program-program yang akan dijalankan oleh pemerintah berdasarkan isu-isu strategis dan permasalahan yang ada.

### **2.3. Kinerja Pelayanan BAPPEDA Provinsi Kalimantan Timur**

Pengukuran tingkat capaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2012 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2012 dengan realisasi pelaksanaannya. Tingkat capaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2012 dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:



**Tabel 2.3**  
**Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi BAPPEDA Provinsi Kalimantan timur**

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi BAPPEDA	TUGAS SPM	TARGET IKK	TARGET INDIKATOR LAINNYA	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1.	Persentase Pencapaian Arah Kebijakan RPJMD Melalui Pencapaian Prioritas dan Sasaran RKPD		58,57		46,14	48,14	52,29	56,14	58,57	18,52	27,56	39,55	65,00	80,00	36,46	43,65	64,76	111,30	112,23
	Persentase Pencapaian Pelaksanaan RKPD																		
	Persentase dokumen Renstra yang sesuai peraturan perundang-undangan dan berorientasi outcome/impact			35,00	25,00	25,00	28,00	33,00	35,00	0,00	0,00	0,00	33,00	33,00	0,00	0,00	0,00	100,00	94,29
	Persentase dokumen Renja yang sesuai peraturan perundang-undangan dan berorientasi outcome			35,00	25,00	25,00	28,00	33,00	35,00	0,00	0,00	0,00	33,00	33,00	0,00	0,00	0,00	100,00	94,29
	Persentase penetapan kinerja yang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku			90,00	70,00	75,00	80,00	85,00	90,00	68,00	82,00	84,00	86,17	86,17	97,14	109,33	105,00	101,38	95,74
	Persentase perencanaan program/kegiatan prioritas daerah yang sesuai dengan prioritas nasional			90,00	79,00	81,00	86,00	88,00	90,00	40,24	53,80	64,30	75,00	71,42	50,94	66,42	74,77	85,23	79,36
	Persentase perencanaan program/kegiatan prioritas daerah yang mendukung program/kegiatan regional			35,00	20,00	25,00	30,00	33,00	35,00	21,43	21,43	57,14	64,28	78,57	107,15	85,72	190,47	194,79	224,49

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi BAPPEDA	TUGAS SPM	TARGET IKK	TARGET INDIKATOR LAINNYA	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	Persentase perencanaan program/kegiatan kabupaten/kota yang sesuai dengan program/kegiatan prioritas daerah			90,00	79,00	81,00	86,00	88,00	90,00	0,00	35,71	71,43	86,00	92,85	0,00	44,09	83,06	97,73	103,17
	Persentase SKPD yang melaporkan evaluasi kinerjanya (outcome) sesuai dengan RKPD			35,00	25,00	25,00	28,00	33,00	35,00	0,00	0,00	0,00	33,00	33,00	0,00	0,00	0,00	100,00	94,29
2.	Persentase Konsistensi Program / Kegiatan RKPD yang Tercantum dalam APBD		53,00		44,00	46,38	48,25	50,88	53,00	25,18	32,56	40,99	64,60	53,29	67,46	77,32	85,12	98,50	98,31
	Persentase peningkatan belanja langsung dari total belanja APBD			51,00	45,00	47,00	48,00	50,00	51,00	45,45	49,10	46,30	49,44	50,61	101,00	104,47	96,46	98,88	99,24
	Persentase peningkatan belanja modal dari total belanja APBD			29,00	25,00	26,00	27,00	28,00	29,00	29,65	29,21	23,53	24,75	27,68	118,60	112,35	87,15	88,39	95,45
	Persentase alokasi pembiayaan untuk program prioritas			42,00	36,00	37,50	38,00	40,50	42,00	10,11	17,42	28,39	37,73	38,34	28,08	46,45	74,71	93,16	91,29
	Persentase dokumen RKA yang sesuai dengan dokumen Renja SKPD			90,00	70,00	75,00	80,00	85,00	90,00	15,52	34,52	65,73	96,53	96,53	22,17	46,03	82,16	113,56	107,26
3.	Persentase Pencapaian Sasaran RPJMD		66,50		53,73	56,33	59,17	62,50	66,50	45,65	51,44	58,17	64,60	75,00	87,54	91,81	97,28	101,17	144,37
	Persentase usulan program/kegiatan stakeholder yang sesuai dengan visi pembangunan dalam dokumen perencanaan			37,00	27,00	29,00	32,00	35,00	37,00	25,24	26,17	30,14	35,49	83,02	93,48	90,24	94,19	101,40	224,38

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi BAPPEDA	TUGAS SPM	TARGET IKK	TARGET INDIKATOR LAINNYA	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	Persentase penjabaran usulan program/ kegiatan oleh SKPD Provinsi dan Kab/Kota yang mengacu kepada dokumen perencanaan			32,00	22,00	24,00	27,00	30,00	32,00	21,13	22,85	24,81	25,45	78,91	96,05	95,21	91,89	84,83	246,59
	Persentase capaian kinerja pembangunan bidang Ekonomi			75,00	54,40	60,00	65,00	70,00	75,00	51,28	57,83	65,53	69,73	69,73	94,26	96,38	100,82	99,61	92,97
	Persentase capaian kinerja pembangunan bidang Prasarana dan Pengembangan Wilayah			85,00	73,00	75,00	77,00	80,00	85,00	60,53	68,46	75,34	85,82	85,82	82,92	91,28	97,84	107,28	100,96
	Persentase capaian kinerja pembangunan bidang Sumber Daya Manusia			85,00	73,00	75,00	77,00	80,00	85,00	59,80	65,42	80,25	88,13	88,13	81,92	87,23	104,22	110,16	103,68
	Persentase capaian kinerja pembangunan bidang Pemerintahan dan Aparatur			85,00	73,00	75,00	77,00	80,00	85,00	55,92	67,89	72,93	83,00	83,00	76,60	90,52	94,71	103,75	97,65

Berdasarkan hasil interpretasi tabel 2.3, dikatakan bahwa sebesar 55 persen kinerja BAPPEDA masih dibawah target yang ingin dicapai, sedangkan sebesar 45 persen indikator kinerja dapat melampaui target. Permasalahan-permasalahan yang timbul dalam pencapaian target kinerja BAPPEDA selama ini adalah:

- Intervensi kepentingan politik yang di luar kendali teknis perencanaan BAPPEDA;
- Belum optimalnya integrasi perencanaan pembangunan di tingkat kabupaten/kota;
- Jadwal pemilihan kepala daerah di tingkat provinsi dan beberapa kabupaten/kota yang tidak bersamaan menyebabkan arah kebijakan perencanaan berbeda;
- Terjadinya perubahan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh terhadap perencanaan di tingkat daerah; dan
- RPJMN dan Permendagri 54 Tahun 2010 sebagai pedoman penyusunan RPJMD terbit setelah RPJMD ditetapkan.

Dalam pelaksanaan program/kegiatan prioritas, BAPPEDA Provinsi Kalimantan Timur memerlukan pendanaan untuk memperlancar pembangunan daerah. Namun hakikatnya, program/kegiatan prioritaslah yang harus menyesuaikan kondisi anggaran pemerintah daerah. Hal ini menjadi salah satu penyebab kurang maksimalnya pelaksanaan program/kegiatan prioritas karena jika anggaran yang dibutuhkan tidak mencukupi maka program/kegiatan pun tidak akan berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Gambaran pendanaan BAPPEDA Provinsi Kalimantan Timur dalam kurun waktu lima tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut:



**Tabel 2.4**  
**Gambaran Pendanaan BAPPEDA Kalimantan Timur**

No	Uraian ***	Anggaran pada tahun ke-					Realisasi Anggaran pada tahun ke-					Rasio antara Realisasi dgn Anggaran Tahun ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
	<b>PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS</b>	<b>26.609</b>	<b>25.363</b>	<b>25.363</b>	<b>37.061</b>	<b>42.633</b>	<b>22.562</b>	<b>22.820</b>	<b>22.820</b>	<b>34.230</b>	<b>41.082</b>	<b>84,79</b>	<b>89,97</b>	<b>89,97</b>	<b>92,36</b>	<b>96,36</b>	<b>10,36</b>	
																	<b>10,73</b>	
1	<b>Program Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>6.081</b>	<b>6.526</b>	<b>6.625</b>	<b>9.837</b>	<b>14.060</b>	<b>4.965</b>	<b>5.536</b>	<b>6.036</b>	<b>9.369</b>	<b>13.567</b>	81,64	84,83	91,11	95,24	96,49	<b>14,33</b>	
	Penyusunan Rancangan RPJMD	-	-	-	-	1.794	-	-	-	-	1.699					94,68	29,17	
	Penyusunan Rancangan RKPD	625	562	808	600	1.300	561	529	667	542	1.258	89,80	94,14	82,57	90,27	96,78	1,99	
	Penyelenggaraan Musrenbang RPJPD	225	-	-	-	-	111	-	-	-	-	49,22					-25,00	
	Penyelenggaraan Musrenbang RPJMD	200	-	-	-	-	181	-	-	-	-	90,48					-17,08	
	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	1.631	1.515	1.289	1.500	1.975	1.451	1.392	1.227	1.438	1.880	88,92	91,85	95,17	95,83	95,19	-1,42	
	Penetapan RPJMD	200	-	-	-		177	-	-	-	-	88,54					-12,50	
	Penetapan RKPD	100	100	100	100	150	88	98	99	93.238	150	87,92	97,60	98,62	93,24	99,87	0,00	
	Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	100	150		450	450	87	136	93	397	415	86,60	90,78	91,96	88,26	92,24	84,77	



No	Uraian ***	Anggaran pada tahun ke-					Realisasi Anggaran pada tahun ke-					Rasio antara Realisasi dgn Anggaran Tahun ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggar an	Realisa si
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
	(LAKIP)																	
	Monitoring, evaluasi, pengend. & pelaporan pelaks. Rencana pemb. Daerah	2.800	2.224	1.939	2.122	1.597	2.131	1.726	1.930	2.077	1.574	76,09	77,59	99,53	97,86	98,53	17,77	
	Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaba n (LKPJ)	200	500	300	500	975	179	476	299	492	965	89,62	95,17	99,81	98,42	98,93	45,30	
	Pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah	-	-	400	1.884	1.969	-	-	305	1.716	1.875			76,24	91,10	95,25	92,75	
	Kajian kerangka pendanaan pemerintah Provinsi Kaltim	-	-	350	-	-	-	-	310	-	-			88,55			-25,00	
	Gugus kendali pembangunan Kaltim bangkit 2013	-	-	-	1.000	1.000	-	-	-	995	1000				99,48	99,97	34,43	
	Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran	-	-	-	631	1.500	-	-	-	630	1.498				99,88	99,87	0,00	
	Evaluasi	-	500	600	-	-	-	488	598	-	-		97,56	99,60			-45,00	





No	Uraian ***	Anggaran pada tahun ke-					Realisasi Anggaran pada tahun ke-					Rasio antara Realisasi dgn Anggaran Tahun ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
	pelaksanaan RPJMD Kaltim																	
	Kajian perencanaan pembangunan daerah	-	975	738	1.050	-	-	692	508	989	-		71,02	68,94	94,16		4,50	
	Kaltim Summit 2013	-	-	-	-	1.350	-	-	-	-	1.254					92,87	0,00	
																	3,57	
2	<b>Program Pengembangan Data/Informasi</b>	<b>3.832</b>	<b>7.112</b>	<b>6.224</b>	<b>6.999</b>	<b>7.999</b>	<b>3.602</b>	<b>6.898</b>	<b>5.650</b>	<b>6.589</b>	<b>7.595</b>	<b>94,00</b>	<b>96,99</b>	<b>90,79</b>	<b>94,13</b>	<b>94,94</b>	<b>23,43</b>	
	Penyusunan dan pengumpulan data informasi kebutuhan peny.dokumen perencanaan	1.954	4.132	3.796	3.356	3.628	1.838	3.972	3.393	3.046	3.386	94,09	96,12	89,37	90,76	93,33	27,21	
	Pengumpulan, up dating dan analisis data info.capaian target kinerja prog.& kegiatan	1.545	2.269	1.963	2.717	3.181	1.484	2.237	1.840	2.691	3.151	96,05	98,59	93,73	99,05	99,06	4,71	
	Penyusunan Profile Daerah	333	411	289	420	198	279	396	288	403	169	83,90	96,40	99,65	95,85	85,37	33,72	
	Sistem Informasi dan Updating Data	-	300	175	507	993	-	293	129	450	889		97,66	73,72	88,68	89,57	37,01	
																	71,69	



No	Uraian ***	Anggaran pada tahun ke-					Realisasi Anggaran pada tahun ke-					Rasio antara Realisasi dgn Anggaran Tahun ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggar an	Realisa si
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
3	Program Kerjasama Pembangunan	650	929	1.000	801	3.099	544	820	888	743	2.889	83,66	88,33	88,75	92,77	93,25	79,36	
	Koordinasi kerjasama pembangunan antar daerah	650	923	1.000	801	3.099	544	820	888	743	2.889	83,66	88,33	88,75	92,77	93,25	7,67	
																	24,96	
4	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	995	3.242	2.440	1.162	2.321	929	2.169	1.939	1.129	2.313	93,41	66,90	79,47	97,19	99,63	62,14	
	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi	995	2.425	2.440	1.162	2.321	929	1.739	1.939	1.129	2.313	93,41	71,72	79,47	97,19	99,63	22,99	
	Monitoring evaluasi dan pelaporan	-	817	-	-	-	-	429	-	-	-		52,58				-25,00	
																	-9,29	
5	Program Perencanaan Pengembangan wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh.	900	4.219	2.718	9.028	5.674	762	2.844	2.597	7.633	5.582	84,67	67,41	95,54	84,55	98,37	138,82	



No	Uraian ***	Anggaran pada tahun ke-					Realisasi Anggaran pada tahun ke-					Rasio antara Realisasi dgn Anggaran Tahun ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggar an	Realisa si
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
	Koordinasi Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	900	919	1.491	3.528	3.173	762	851	1.405	3.266	3.098	84,67	92,55	94,23	92,58	97,62	36,60	
	Penyusunan Perencanaan KAWASAN Industri Pelabuhan Internasional	-	3.300	1.227	5.500	2.501	-	1.993	1.192	4.367	2.484		60,41	97,13	79,39	99,32	71,36	
																	6,42	
6	<b>Program Perencanaan Prasarana wilayah dan Sumber Daya Alam</b>	<b>1.950</b>	<b>1.636</b>	<b>2.195</b>	<b>3.710</b>	<b>4.662</b>	<b>1.477</b>	<b>1.395</b>	<b>1.720</b>	<b>3.367</b>	<b>4.496</b>	75,75	85,26	78,36	90,76	96,44	42,86	
	Koordinasi Penyusunan masterplan pengendalian sumberdaya alam dan LH	1.400	-	-	1.438	2.651	957	-	-	1.397	2.524	68,36			97,15	95,22	-27,66	
	Koordinasi Penyusunan Masterplan Prasarana Wilayah	550	1.125	1.089	1.754	1.568	520	1.019	856	1.505	1.533	94,58	90,52	78,58	85,81	97,80	40,61	
	Penyusunan perencanaan pengembangan	-	-	1.106	-	-	-	-	864	-	-			78,15			-28,58	



No	Uraian ***	Anggaran pada tahun ke-					Realisasi Anggaran pada tahun ke-					Rasio antara Realisasi dgn Anggaran Tahun ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
	prasarana wilayah																	
	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	-	511	-	518	444	-	376	-	465	439		73,67		89,80	98,89	-25,00	
																	3,85	
7	Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar	-	-	250	650	750	-	-	218	633	742			87,11	97,43	98,90	42,50	
	Koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan	-	-	125	500	550	-	-	116	489	544			92,51	97,77	98,82	83,33	
	Koordinasi perencanaan penanganan perumahan	-	-	125	150	200	-	-	102	144	198			81,70	96,30	99,11	5,00	
																	-3,81	
8	Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya	2.400	1.417	1.653	2.334	1.978	2.007	1.400	1.624	2.288	1.895	83,63	98,84	98,22	98,01	95,81	-5,48	
	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan Budaya	2.400	1.417	1.653	2.334	1.428	2.007	1.400	1.624	2.288	1.371	83,63	98,84	98,22	98,01	96,02	4,23	
	Koordinasi penyusunan	-	-	-	-	550	-	-	-	-	524					95,26	0,00	

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR



No	Uraian ***	Anggaran pada tahun ke-					Realisasi Anggaran pada tahun ke-					Rasio antara Realisasi dgn Anggaran Tahun ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggar an	Realisa si
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
	masterplan pendidikan																	
																	-4,43	
9	<b>Program Perencanaan Pembangunan Pemerintahan dan Aparatur</b>	-	1.528	2.258	2.539	2.089	-	1.499	2.148	2.479	2.0025		98,13	95,16	97,66	95,87	9,76	
	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Aparatur	-	1.017	1.908	2.027	1.597	-	990	1.819	1.969	1.519		97,40	95,35	97,18	95,15	23,46	
	Kegiatan koordinasi perencanaan sertifikasi lahan terlantar	-	-	350	-	-	-	-	329	-	-			94,10			-25,98	
	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	-	511	-	512	492	-	509	-	510	484		99,58		99,55	98,20	-25,00	
																	0,00	
10	<b>Program Pengembangan Wilayah Perbatasan</b>	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-25,00	
	Penyusunan Perencanaan Pengembangan Perbatasan	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-25,00	
												-	-	-	-	-	-7,85	



No	Uraian ***	Anggaran pada tahun ke-					Realisasi Anggaran pada tahun ke-					Rasio antara Realisasi dgn Anggaran Tahun ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggar an	Realisa si
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
	<b>PROGRAM / KEGIATAN RUTIN</b>	<b>7.309</b>	<b>9.235</b>	<b>15.410</b>	<b>13.849</b>	<b>9.502</b>	<b>6.333</b>	<b>8.026</b>	<b>13.798</b>	<b>12.406</b>	<b>9.087</b>	<b>86,65</b>	<b>86,91</b>	<b>89,54</b>	<b>89,58</b>	<b>95,63</b>	<b>20,77</b>	
												-	-	-	-	-	-6,19	
1	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>4.077</b>	<b>5.076</b>	<b>4.315</b>	<b>5.071</b>	<b>3.815</b>	<b>3.432</b>	<b>4.362</b>	<b>3.891</b>	<b>4.820</b>	<b>3.712</b>	<b>84,19</b>	<b>85,94</b>	<b>90,17</b>	<b>95,06</b>	<b>97,29</b>	<b>6,76</b>	
	Penyediaan jasa surat menyurat	12	15	15	15	15	5	13	13	14	15	36,89	89,95	87,00	96,00	100,00	11,05	
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	528	718	616	588	713	413	537	475	565	679	78,30	74,78	77,08	96,07	95,30	-18,96	
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional penyediaan jasa kantor	113	194	225	529	37	99	192	222	527	19	87,02	98,75	98,69	99,60	52,51	55,57	
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	237	313	-	-	-	202	259	-	-	-	85,02	82,76	-	-	-	-16,09	
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	360	576	576	655	678	352	425	416	525	664	97,91	73,86	72,22	80,12	98,02	18,42	
	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	64	90	-	-	-	63	89	-	-	-	98,28	98,44	-	-	-	-21,65	
	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	80	357	250	184	134	80	356	250	182	134	99,97	99,96	99,81	99,39	100,00	64,21	



No	Uraian ***	Anggaran pada tahun ke-					Realisasi Anggaran pada tahun ke-					Rasio antara Realisasi dgn Anggaran Tahun ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggar an	Realisa si
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
	Penyediaan alat tulis kantor	65	186	185	185	125	65	185	183	185	125	99,93	99,65	98,95	99,99	99,87	46,28	
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	50	71	47	50	50	50	71	47	50	50	100,00	99,90	99,99	99,37	100,00	3,55	
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	19	115	57	60	60	19	88	51	60	60	99,98	76,71	89,45417	99,99	100,00	131,93	
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	338	290	141	60	95	78	55	122	58	94	23,19	19,02	86,55	97,27	99,03	-30,82	
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	-	-	62	65	65	-	-	59	56	56	-	-	95,42	86,52	85,67	0,56	
	Penyediaan makanan dan minuman	576	179	304	210	205	389	138	219	209	204	67,61	76,80	72,08	99,58	99,30	-18,26	
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	1.188	1.327	1.300	1.750	1.000	1.188	1.327	1.300	1.692	999	99,97	99,99	100,00	96,66	99,86	6,90	
	Rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan ke dalam daerah	362	584	500	600	500	361	584	500	596	499	99,97	99,99	99,96	99,40	99,72	-8,21	
	Penyediaan jasa pegawai non PNS	85	60	36	121	-	68	42	34	101	-	80,11	69,40	92,31	83,62	-	40,70	



No	Uraian ***	Anggaran pada tahun ke-					Realisasi Anggaran pada tahun ke-					Rasio antara Realisasi dgn Anggaran Tahun ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
	Pengamanan aset, kantor dan rumah jabatan	-	-	-	-	139	-	-	-	-	115	-	-	-	-	82,47	0,00	
												-	-	-	-	-	-12,26	
2	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>1.567</b>	<b>1.700</b>	<b>7.914</b>	<b>6.599</b>	<b>3.363</b>	<b>1.335</b>	<b>1.441</b>	<b>7.131</b>	<b>5.788</b>	<b>3.227</b>	<b>85,18</b>	<b>84,77</b>	<b>90,10</b>	<b>87,70</b>	<b>95,97</b>	<b>71,80</b>	
	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	986	535	3.753	3.012	899	886	500	3.300	2.744	897	89,84	93,35	87,94	91,10	99,71	133,94	
	Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	-	47			-	-	46			-	-	98,71	-	-	-	-25,00	
	Pengadaan peralatan gedung kantor	-	-	-	-	1.079	-	-	-	-	1.066	-	-	-	-	98,76	0,00	
	Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas	-	20		-	-	-	20	-	-	-	-	99,50	-	-	-	-50,00	
	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	-	-	-	957	-	-	-	-	863	-	-	-	-	90,17	-	-25,00	
	Pengadaan sarana administrasi kantor	27	27	30	30	-	27	25	28	-	-	97,55	92,32	92,61	0	-	-3,80	
	Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan	-	41	84	100	75	-	40	78	95	36	-	96,77	93,19	94,47	47,89	45,61	



**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**



No	Uraian ***	Anggaran pada tahun ke-					Realisasi Anggaran pada tahun ke-					Rasio antara Realisasi dgn Anggaran Tahun ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggar an	Realisa si
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	-	126	75	100	160	-	123	50	92	154	-	98,33	66,57	91,88	96,36	-1,73	
	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	361	-	-	-	-	257	-	-	-	-	71,22 596	-	-	-	-	-25,00	
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	67	65	200	-	446	57	61	199	-	378	85,11 303	92,44	99,36	-	84,89	6,04	
	Pemeliharaan rutin/berkala sarana pengolahan dan penyimpanan arsip	-	64	100	556	116	-	56	93	520	116	-	87,41	92,51	93,45	99,64	181,19	
	Pelayanan acara-acara Pemprov dan BAPPEDA Prov.Kaltim	-	-	173	173	542	-	-	45	131	536	-	-	26,17	75,86	98,89	-25,00	
	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	126	775	3.500	1.572	-	108	571	3.339	1.246	-	86,15	73,66	95,40	79,28	-	189,76	
	Sertifikasi sistem manajemen ISO 9001-2000 Prov.Kaltim	-	-	-	100	45	-	-	-	98	44	-	-	-	98,07	98,27	0,00	
												-	-	-	-	-	-10,14	
3	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	-	299	100	161	96	-	246	84	139	96	-	82,32	84,20	86,33	99,90	-26,38	



No	Uraian ***	Anggaran pada tahun ke-					Realisasi Anggaran pada tahun ke-					Rasio antara Realisasi dgn Anggaran Tahun ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggar an	Realisa si
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	-	299	-	114	-	-	246	-	97	-	-	82,32	-	84,63	-	-25,00	
	Penyusunan SOP berbasis IT	-	-	100	-	-	-	-	84	-	-	-	-	84,20	-	-	-25,00	
	Pengadaan pakaian KORPRI	-	-	-	-	36	-	-	-	-	36	-	-	-	-	99,73	6,91	
	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	-	-	-	47	60	-	-	-	42	60	-	-	-	90,49	100,00	0,00	
												-	-	-	-	-	0,00	
4	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	-	-	-	-	535	-	-	-	-	475	-	-	-	-	88,85	0,00	
	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	-		-	-	535	-		-	-	475	-	-	-	-	88,85	0,00	
												-	-	-	-	-	3,33	
5	<b>Program Peningkatan dan Pengembangan</b>	278	422	1.280	1.077	1.221	277	399	1.181	875	1.106	99,54	94,46	92,31	81,18	90,56	63,14	



No	Uraian ***	Anggaran pada tahun ke-					Realisasi Anggaran pada tahun ke-					Rasio antara Realisasi dgn Anggaran Tahun ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
	<b>Pengelolaan Keuangan Daerah</b>																	
	Peningkatan manajemen pengelolaan keuangan daerah	278	422	1.280	1.077	1.221	277	399	1.181	875	1.106	99,54	94,46	92,31	81,18	90,56	59,80	
												-	-	-	-	-	-12,44	
6	<b>Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>1.387</b>	<b>1.738</b>	<b>1.801</b>	<b>941</b>	<b>473</b>	<b>1.289</b>	<b>1.579</b>	<b>1.511</b>	<b>785</b>	<b>471</b>	92,96	90,81	83,88	83,35	99,63	-10,76	
	Peningkatan kemampuan teknis aparat perencanaan	537	501	789	525	398	521	486	721	424	397	97,06	97,02	91,32	80,69	99,74	4,32	
	Sosialisasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah	850	1.137	937	-	-	768	1.003	715	-	-	90,37	88,21	76,34	-	-	-45,96	
	Bimbingan teknis tentang perencanaan pembangunan daerah	-	-	-	341	-	-	-	-	306	-	-	-	-	89,79	-	0,00	
	Penyusunan analisis jabatan	-	100	75	75	75	-	89	75	55	74	-	89,15	99,79	72,70	99,06	-6,25	

Berdasarkan penjabaran pada tabel 2.5, dapat terlihat bahwa rata-rata pertumbuhan pendanaan untuk program/kegiatan prioritas sebesar 14,11 persen, sementara untuk pendanaan bagi program/kegiatan belanja operasional (kesekretariatan) mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 12,93 persen. Selain itu, tingkat penyerapan anggaran mengalami peningkatan rata-rata 16,68 persen per tahun. Hal ini menunjukkan bahwa:

- Sejak tahun 2009 BAPPEDA sedang berbenah untuk melengkapi sarana dan prasarana agar lebih representatif dalam pelaksanaan kegiatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya;
- Tingginya frekuensi rapat koordinasi di BAPPEDA, sehingga membutuhkan penambahan ruang rapat dan fasilitas pendukung serta biaya operasional; dan
- Alokasi anggaran untuk kegiatan BAPPEDA secara keseluruhan telah memperhitungkan kebutuhan pelaksanaan kegiatan perencanaan dan pengendalian pembangunan.

#### **2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan BAPPEDA**

Terkait dengan tugas pokok dan fungsi, BAPPEDA Provinsi Kalimantan Timur memiliki berbagai permasalahan yang menghambat kinerja dalam pencapaian pembangunan daerah. Namun seiring berjalannya waktu, peningkatan kinerja merupakan "syarat mutlak" dalam pelaksanaan reformasi birokrasi di lembaga pemerintahan sehingga setiap permasalahan yang ada harus diselesaikan sesuai dengan porsinya masing-masing. Selain itu, tingginya sumber daya serta sarana dan prasarana yang dimiliki, maka BAPPEDA memiliki peluang besar untuk meningkatkan pelayanan publik dalam mengawal pembangunan daerah menuju **Kaltim Maju 2018**. Dalam usaha pencapaian **Kaltim Maju 2018**, BAPPEDA Provinsi Kalimantan Timur memiliki dinamika tantangan pembangunan sebagai berikut:

- Tingginya kepercayaan Gubernur terhadap keberadaan BAPPEDA dalam hal perencanaan hingga pengkoordinasian pembangunan daerah;
- Pesatnya perkembangan teknologi informasi;
- Tersedianya sarana dan prasarana teknologi yang memadai;
- Adanya kerjasama regional se-Kalimantan yang sudah terjalin untuk keterpaduan perencanaan pembangunan tingkat Nasional; dan
- Tersedianya peraturan yang mendukung kegiatan perencanaan dan evaluasi.

Di samping itu, berbagai ancaman eksternal juga perlu diantisipasi dalam penyusunan strategi dan kebijakan perencanaan pembangunan ke depan. Ancaman eksternal yang dimaksud antara lain:

- Belum efektifnya pelaksanaan sistem dan mekanisme koordinasi perencanaan dan penganggaran;
- Belum efektifnya koordinasi antara perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan;
- Belum optimalnya sistem pengendalian dan evaluasi pembangunan;
- Semakin besarnya tuntutan perencanaan yang berkualitas;
- Kekayaan potensi sumber daya alam di Provinsi Kalimantan Timur yang belum dikelola dengan baik;
- Adanya ego SKPD dan pemangku kebijakan yang menyebabkan rendahnya konsistensi antara perencanaan dan pelaksanaan pembangunan; dan
- Semakin besarnya tuntutan sistem penganggaran yang efektif, efisien, partisipatif, dan transparan berbasis teknologi sehingga dalam aksesibilitas data dan informasi tidak terhalang jarak, tempat, dan waktu.